

JEMBATAN DI BREBES PUTUS

Ratusan Warga Terisolir

BREBES (KR) - Ratusan warga Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes terisolir akibat jembatan Sungai Cacaban putus karena tanah longsor setelah diguyur hujan. Dari pihak Pemerintah belum ada tanda-tanda untuk segera memperbaiki jembatan itu.

Menurut Kepala Desa Tambakserang, Usef Asikin, jembatan putus pada Rabu (2/2) malam. Sebelum jembatan itu putus, wilayah itu diguyur hujan deras. Padahal, jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat di Pedukuhan Curugluhur.

"Akibat terputusnya jembatan itu, banyak warga kami terisolir. Itu merupakan akses jalan satu-satunya dan membuat warga kami tidak bisa ke mana-mana," tandasnya, Jumat (4/2).

Menurut Asikin, akibat jembatan putus juga mengganggu kegiatan di bidang pendidikan. Bankan banyak anak sekolah tidak bisa berangkat ke sekolah. "Rencananya pihak desa bersama warga akan segera akan membuat jembatan darurat agar bisa dilewati warga dan anak sekolah," ungkapnya.

Asikin sangat berharap Pemkab Brebes segera membantu rehab jembatan yang putus itu, mengingat jembatan tersebut sebagai satu-satunya akses utama warga setempat.

Mardi warga setempat, mengaku kesulitan untuk beraktivitas ke luar kampung, termasuk anaknya yang masih sekolah di tingkat SMP dan SD. "Terpaksa anak-anak saya sementara ini tidak berangkat ke sekolah," jelasnya. (Ryd)

DI KABUPATEN PATI

Pengurus Permandes Dikukuhkan

PATI (KR) - Sejumlah mantan kepala desadi Kabupaten Pati membentuk Persatuan Mantan Kepala Desa. Organisasi ini telah disahkan di Kemnekum HAM dan sudah dikukuhkan oleh Bupati Pati Haryanto. Menurut mantan Kades Pasucen Kecamatan Trangkil, H Budiyo SH, sebelumnya dari Bumi Pati sudah pernah melahirkan organisasi peduli desa, di antaranya Pasopati, Praja dan Parade Nusantara.

Hal senada juga diungkapkan H Nabiyanto SH (mantan Kades Margorejo) dan Mubaligh SH (mantan Kades Tambaharjo). Sementara itu Ketua Permandes Pati, H Karwito SPd MPd mengatakan persiapan mendirikan Permandes sudah dilakukan sejak Juni 2021 sampai mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU 0011968.AH.01.07 tanggal 12 Oktober 2021. "Permandes sebagai wadah silaturahmi para mantan kades untuk ikut membangun desa, menjaga NKRI, serta untuk pemberdayaan ekonomi anggota" jelas Karwito yang mantan kades Sidomukti Kecamatan Margoyoso, didampingi mantan kades lainnya, Prasetyo SH dan S Karjono SH MH. (Cuk)

DI BANYUMAS DAN PEKALONGAN

Masih Ada Bansos Belum Sampai KPM

BANYUMAS (KR) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Wastam, mengatakan bahwa berdasarkan data dan informasi, di sejumlah daerah masih ditemukan bansos yang belum sampai di tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Di Banyumas dan Pekalongan, saya dapat data masih sekitar 27.000 yang belum dicairkan," ungkapnya, Jumat (5/2).

Kalau dinilai dengan nominal, lanjut Wastam, ada sekitar Rp 5,4 miliar bansos untuk satu kabupaten. "Ini sangat besar. Yang lebih penting lagi, ini ada hak penerima manfaat," tandas Wastam.

Dalam kunjungan kerja di sejumlah daerah, Wastam memastikan pencarian bansos untuk Kabupaten Banyu-

mas. Berkaitan kondisi itu, Wastam menekankan kepada para pendamping dan bank penyalur untuk bekerja lebih keras sehingga bantuan segera cair dan segera dibagikan. "Saya minta pencairan dipercepat. Lakukan koordinasi dan temukan di mana kendalanya," tegas Wastam didampingi Harry Hikmat.

Untuk memastikan percepatan pencairan, Wastam meminta diagendakan pertemuan koordinasi untuk memastikan bansos segera cair. Pertemuan melibatkan para pendamping, bank penyalur, dan instansi terkait, baik dari desa/kelurahan maupun dari unsur-unsur dinas sosial.

Kepada KPM di setiap titik kunjungan, Wastam dan Sekjen kemensos Harry Hik-

mat berpesan agar bantuan digunakan untuk keperluan yang mendesak dan produktif. "Silahkan untuk membeli kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan atau mungkin untuk modal usaha bila memang ada kelebihan," kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Meski begitu, Komisi VIII DPR RI menyambut baik langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang terus mendorong pencairan bantuan sosial. Menurutnya, akselerasi alur bansos diperlukan untuk memastikan KPM mendapatkan haknya dan secara umum memperkuat program penanganan kemiskinan. "Atas arahan Mensos Risma, seluruh jajaran Kemensos, baik pejabat Eselon



KR-Istimewa

Pejabat Kemensos dan anggota Komisi VIII saat memantau pencairan bansos di Banyumas.

I, II, para kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan staf bersama dengan anggota Komisi VIII, turun ke sejumlah daerah untuk memastikan pencairan bansos," tandasnya. Di Kabupaten Banyumas, pencairan bansos disaksikan langsung oleh anggota Komisi VIII, Wastam, dan Sekertaris Jenderal Kemensos, Harry Hoikmat, Kamis (2/2). (Dri)

DIANGGAP MEMATIKAN AGUS BUS MALAM

Trayek Jatipuro-Jabodetabek Diprotes

KARANGANYAR (KR) - Pembukaan trayek bus Jatipuro-Jabodetabek dan Bandung diprotes paguyuban agen bus antarkota antar provinsi (AKAP) di Kabupaten Karanganyar. Trayek tersebut dianggap mematikan usaha mereka yang sudah terlebih dulu memulai bisnis di terminal induk.

Protes tersebut disampaikan 25 pengusaha agen bus malam yang tergabung dalam Bismajaya dan Pabmasih Jaya saat audiensi yang dihadiri Komisi A dan Komisi C DPRD Karanganyar serta Dishub PKP Karanganyar, Kamis (3/2) di ruang OR DPRD, Kamis (3/2).

"Hasil kesepakatan antara Ornganda dengan Dishub dan Satlantas pada 2018 lalu bahwa yang diizinkan buka agen bus AKAP hanya di Terminal Tegalgede, Terminal Matesih dan Terminal Karangpandan. Adapun sub termi-

nal di kecamatan lain itu mengoperasikan armada komuter menuju terminal induk. Nah, dengan adanya trayek Jatipuro-Jabodetabek dan Jatipuro-Bandung merubah tatanannya," kata Koordinator Paguyuban Agen Bisma Jaya, Suhardono.

Trayek baru bus AKAP ke Jatipuro itu diresmikan Bupati Karanganyar Juliayatmono, 23 Januari 2022. Pembukaan trayek tersebut dimaksud untuk menjawab permintaan warga perantau agar perjalanan mereka menuju kampung halaman dipermudah. Artinya, sekali jalan tanpa harus oper ke armada komuter. Wilayah Jatipuro dan sekitarnya merupakan kantong pekerja perantau yang mencapai puluhan ribu jiwa.

Selama ini, para perantau pulang kampung dan pergi ke tanah rantau menggunakan jasa ang-

kutan bus malam AKAP di terminal induk yang lumayan jauh jaraknya. Padahal terminal induk hanya ada di wilayah kota Karanganyar, Matesih dan Karangpandan.

Para agen bus malam mendesak Pemkab menarik dan membatalkan trayek itu. Bus yang masuk ke daerah Jatipuro seharusnya mengangkut penumpang dari terminal induk. Bukan potong kompas seperti ini. Lagi pula, jalan menuju Jatipuro dan sekitarnya tidak untuk bus spesifikasi high deck.

Menurut Suhardono, sejak trayek baru Jatipuro dibuka beberapa waktu lalu, agen bus yang ada di Terminal Tegalgede praktis tidak mendapatkan penumpang. "Selama ini yang menjadi sumber penghasilan kami adalah para penumpang yang berasal dari Jatipuro dan sekitarnya. Kalau bus dan

agen dibuka di wilayah lain, penghasilan kami hilang," tandasnya.

Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Hanung Turwaji menyatakan akan menyampaikan hasil audiensi dengan para agen bis ini kepada Pemkab Karanganyar melalui pimpinan. "Kami akan sampaikan kepada pemerintah. Prinsipnya, kami juga minta agar kebijakan masuknya bis AKAP ke wilayah Jatipuro dan sekitarnya agar dikaji ulang. Jangan sampai nantinya kebijakan ini merugikan masyarakat lainnya," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, Sri Suboko mengaku dilemat dengan kondisi tersebut. Di satu sisi, kebutuhan angkutan mudah, murah dan cepat sangat dibutuhkan masyarakat. Namun di sisi lain berimbas pada matinya usaha agen bus di terminal induk yang sudah lebih dulu beroperasi. (Lim)

HUKUM

2 Mantan Dirut BKK Terjerat Kasus Korupsi

KARANGANYAR (KR) - Kejaksaaan Negeri Karanganyar menahan dua mantan Direktur Utama BKK Karanganyar dalam kasus dugaan korupsi berkedok pinjaman kredit. Mereka adalah MS Dirut periode 2010-2016 dan Sut yang menjadi Dirut periode 2016-2019.

Kasi Intel Kejari Karanganyar, Guyus Kemal, Kamis (3/2), mengatakan perkara yang menjerat keduanya bergulir pada 2014-2016. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam persetujuan pengajuan pinjaman 27 nasabah dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

Setelah ditelusuri, tak semua nasabah itu riil. Ternyata yang valid hanyalah 11 nasabah saja. Sisanya beridentitas keluarga karyawan. Pengucuran pinjaman itu tak sesuai prosedur. Semuanya dimanipulasi supaya dana segar mengalir untuk kepentingan para tersangka. Berdasarkan hasil audit BPKP, negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.892.170.000.

"Peminjam ternyata pegawai-pegawai dan keluarganya. Proses peminjamannya tidak sesuai prosedur. Yang meminjam dengan agunan tidak sama identitasnya. Yang harusnya diverifikasi kemampuan bayar ternyata tidak dilakukan. Intinya banyak yang dipotong kompas. Akhirnya, terjadi kredit macet," jelasnya.

Masing-masing nasabah mengajukan pinjaman bervariasi, mulai Rp 100 juta sampai Rp 500 juta. Seiring berjalan waktu, para nasabah yang merupakan

pegawai-pegawai PD BKK Karanganyar ngemplang bayar utang. Hal itu yang menyebabkan angka kredit macet tinggi.

Guyus mengatakan dua tersangka itu baru ditahan sekarang, meski kasusnya sudah bergulir hampir 7 tahun. Sebab, laporannya baru masuk tahun 2020. "Ada yang melapor tahun 2020. Langsung kita proses penyelidikan dan penyidikannya," ungkapnya.

Kasi Pidsus Gilang Hidayatullah mengatakan MS dan Sut dititipkan ke Rutan Surakarta selama 20 hari. "Alasan penahanan dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 yang sudah diubah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi dan subsidair Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun.

Dalam kasus lain, dua mantan direktur itu sudah menjalani vonis penjara satu tahun dan denda masing-masing Rp50 juta subsidier satu bulan kurungan. Mereka juga membayar uang pengganti Rp73,5 juta. Kasus itu adalah manipulasi sewa enam mobil operasional kantor mereka menggunakan jasa rental di Sukoharjo. Padahal mobil itu milik mereka yang dibeli secara kredit. Mereka menya-markan kepemilikan. Dalam kasus ini, mereka bersekongkol dengan enam orang lainnya. (Lim)

DIDUGA DILEMPAR DARI LUAR BETENG

100 Butir Pil Koplo Ditemukan di Rutan Bantul

BANTUL (KR) - Sebanyak 100 butir pil daftar G atau pil koplo ditemukan di kompleks Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul, Rabu (2/2) sore. Tepatnya di halaman sela antara beteng dengan bangunan rumah tahanan atau 'brand gang'. Barang tersebut dibungkus dengan bungkus rokok dan kertas tisu serta batu untuk pemberat.

Kepala Rutan Kelas IIB Bantul, Ahmad Sihabudin AMD SH MH didampingi Kepala Keamanan Rutan Jaka Cahyana SH MH, kemarin, membenarkan adanya penemuan pil daftar G di lahan tanaman sayuran halaman 'brand gang'. Barang yang dilarang bebas dari peredaran tersebut bermerek Y.

Obat daftar G sekitar 100 butir awalnya ditemukan oleh petugas jaga yang sedang controlling di lingkungan 'brand gang', melihat ada bungkus yang mencurigikan terbungkus kertas tisu dan bungkus rokok.

Penemuan bungkus barang mencurigikan kemudian dilaporkan kepada komandanannya dan kepada kepala Rutan. Sete-

lah barang itu dibuka dari bungkusnya, ternyata berisi pil daftar G dan dihitung ada 90 butir masih utuh dan 10 butir sudah rusak.

"Diduga kuat bungkus pil koplo itu dilempar dari luar kompleks Rutan bukan pada hari saat ditemukan, karena bungkus itu dalam keadaan basah, sehingga diduga dilemparkan beberapa jam atau hari sebelumnya. Tapi melemparkannya terhalang genteng sehingga tidak sampai ke halaman dalam," ungkap Kepala Rutan Bantul.

Barang tersebut segera diserahkan kepada Polisi, untuk dilakukan pengusutan. Dijelaskan, selama musim pandemi Covid-19 aturan di Rutan



KR-Judiman

Petugas menunjukkan tempat penemuan obat daftar G di lokasi brand gang Rutan Bantul.

BERAKSI DALAM PENGARUH MIRAS

Pencuri Bersajam Dikepung Warga

WONOSARI (KR) - Aksi pencurian di warung yang dilakukan tersangka MA (25) warga Ngawen Gunungkidul, berhasil digagalkan warga Jumat (4/2).

Kini tersangka berhasil diamankan oleh warga dan petugas Unit Reskrim Polsek Ngawen setelah sebelumnya diketahui melakukan tindak pencurian di sebuah warung yang berada di Padukuhan Kampung Lor Ngawen.

"Saat beraksi tersangka membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti calon korba," jelas Kanit Reskrim Polsek Ngawen, Aipda Berbudi Susilo.

Aksi pencurian yang dilakukan tersangka MA dilakukan sekitar

pukul 03.00. Tersangka yang merupakan warga Watusigar ini tertangkap basah sedang merusak pintu warung milik Suyana (45) warga Kampung Lor.

Warga yang mengetahui aksi tersangka merasa geram dan langsung mengepung seluruh bangunan warung untuk menangkap pria tersebut. Saat ditangkap, tersangka sudah berhasil masuk warung dengan cara merusak pintu menggunakan senjata tajam berupa parang.

Selanjutnya masuk ke dalam warung untuk mengambil rokok dan mengacak-acak barang dagangan yang ada di dalam. "Saat beraksi, tersangka dalam pengaruh minuman beralkohol," imbuhnya.

Dalam kondisi mabuk tersebut, tersangka membawa 2 parang untuk melancarkan aksi pencuriannya selain untuk merusak pintu, jika aksinya diketahui untuk menakut-nakuti warga dan pemilik warung. "Tersangka berhasil dibekuk setelah berusaha keluar dari warung langsung disergap warga bersama petugas Polsek Ngawen Polres Gunungkidul.

Proses hukum sudah kami lakukan dan tersangka kami jerat Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan Pasal 363 KUHP ayat 5 jo Pasal 53 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara," terangnya. (Bmp)



KR-Abdul Alim

Tersangka MS dikawal menuju Rutan Surakarta.